

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong penulis menjadikan “Kepentingan Rusia mendukung kedaulatan Palestina” sebagai judul dalam penulisan ini karena adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang negara Rusia (sebagai negara adidaya dan penyeimbang kekuatan besar Amerika Serikat) dan upayanya untuk membangun kembali pengaruhnya dalam pergaulan politik global, diantaranya melalui pencapaian tujuan besar ekonominya. Salah satu diantara tujuan besar ekonomi dan politiknya adalah pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan Rusia terhadap kedaulatan Palestina dengan memperkuat posisi dan kedudukannya di wilayah Timur Tengah. Hal ini menandakan kepentingan sekaligus keinginan Rusia untuk menunjukkan diri kepada dunia internasional sebagai Negara Adidaya, menjaga predikatnya sebagai negara yang disegani di panggung internasional dan sebagian negara yang punya pengaruh di perpolitikan dunia internasional.

Disisi lain ini membuktikan kepentingan Rusia di timur tengah khususnya dalam upaya mendukung kedaulatan negara palestina tidak main-main sehingga telah menjadi perhatian utama Rusia dengan memperkuat pengaruhnya dikawasan ini. Masalah ini semakin menarik karena palestina yang begitu strategis dan memiliki banyak pihak pihak yang berkepentingan terhadap negara

tersebut. Sehingga negara palestina telah menjadi ajang perlombaan pengaruh dan kekuatan di kawasan tersebut.

Bagi penulis pribadi, topik penulisan mengenai Kepentingan Rusia Terhadap kedaulatan Palestina ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kawasan ini dan konflik yang terjadi dikawasan sampai kepada usaha-usaha pencapaian kepentingan masing-masing pihak pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan Palestina, sehingga dapat bermanfaat bagi studi Ilmu Hubungan Internasional. Mengingat kawasan ini selalu mengalami pergolakan setelah runtuhnya Uni Soviet kajian ini akan menjadi semakin menarik dan berguna bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

Hal-hal tersebut membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang permasalahan bagaimana faktor-faktor yang menunjukkan Rusia mendukung kedaulatan palestina. Dan untuk itulah tulisan ini diberi judul ***“Kepentingan Rusia Mendukung Kedaulatan Palestina Dalam Pertemuan Antara Presiden Rusia Dengan Presiden Israel Di Forum Ekonomi Dunia Pada Tanggal 26-30 Januari 2011”***

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana Kepentingan Rusia Mendukung Kedaulatan Palestina, Dan pada umumnya tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

C. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini konflik antara Israel dengan Palestina masih berkecamuk. Berbagai upaya perdamaian telah diusahakan namun kedua negara enggan untuk berdamai sehingga kawasan Timur Tengah masih tetap bergejolak, tidak kondusif, dan masih sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, tingkat taraf hidup dan bahkan demokratisasi yang ingin ditanamkan.

Konflik Israel-Palestina menimbulkan pengaruh (influence) bagi beberapa negara di belahan dunia lainnya di samping menimbulkan dampak bagi berbagai bidang kehidupan dalam negaranya sendiri. Pengaruh ini khususnya dirasakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Ancaman kedaulatan dan keamanan di negara Israel dan Palestina menjadi ancaman pula di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Karena bukan tidak mungkin setelah berhasil menguasai Palestina, Israel juga menginginkan untuk segera menduduki wilayah negara tetangga Palestina. Keinginan Israel untuk menduduki dan berkuasa di Palestina merupakan ancaman besar bagi kaum Muslim yang ada di Timur Tengah, karena wilayah Palestina dipercaya sebagai kota suci bagi pemeluk agama Islam, setelah Mekkah dan Madinah.

Sementara bagi negara-negara lain (di Asia dan di Eropa), konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Permasalahan Israel-Palestina juga mempengaruhi pasaran dan produktifitas minyak dunia serta mempengaruhi negara lain yang memiliki kepentingan di

Presiden Rusia Dmitry Medvedev dalam pernyataannya menekankan agar pertemuan kuartet untuk perdamaian Timur Tengah yang akan berlangsung bulan depan bisa melahirkan resolusi yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh rezim Zionis Israel.

Dalam jumpa pers bersama dengan Kepala Otorita Ramallah di Jericho, Tepi Barat Sungai Jordan, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menekankan soal pembentukan negara Palestina merdeka dengan batas wilayah tahun 1967.

Medvedev menyatakan bahwa Rusia mendukung pelaksanaan program ini. Sebagaimana Uni Soviet pada tahun 1988 telah mengakui Palestina merdeka dengan batas wilayah tahun 1967. Dalam pernyataannya, Presiden Rusia mendesak Israel untuk menghindari langkah-langkah unilateral dan komitmen dengan resolusi dan ketetapan internasional demi mewujudkan perdamaian. Medvedev mengumumkan dukungannya kepada hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara merdeka dengan al-Quds sebagai ibukotanya.

Pada kesempatan itu, ketua Otorita Ramallah Mahmud Abbas menyatakan bahwa Rezim Zionis Israel harus menghentikan pembangunan proyek permukiman dan mentaati resolusi dan ketetapan internasional. Abbas menuduh Israel menjalankan program yang dimaksudkan untuk mengubah identitas dan demografi kependudukan Beitul Maqdis. Lebih lanjut, Mahmoud Abbas menyebut blokade atas Jalur Gaza sebagai tindakan kejam. Abbas meminta Israel untuk menghentikan blokade ini.

Pada tanggal 19 Januari 2011 Pemerintahan Rusia mempertegas dukungannya atas kedaulatan Negara Palestina di Moskow melalui pidato kenegaraan Presiden Rusia Medvedev pada forum ekonomi di Davos. Sikap Moskow tidak berubah sejak era Uni Soviet yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 1988 saat dipimpin oleh Presiden Yasser Arafat².

Sekitar dua bulan lalu, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina juga dilontarkan negara Amerika Latin, termasuk Brasil dan Argentina. Sementara itu, proses negosiasi damai Israel-Palestina mandek sekitar akhir tahun lalu setelah Israel menolak memperpanjang moratorium pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat hingga 10 bulan mendatang. Sejumlah pengamat menilai dukungan itu bisa menjadi pintu bagi rakyat Palestina untuk meraih dukungan penuh dari anggota PBB jika usaha memulai kembali perundingan damai dengan Israel kandas.

Dalam jumpa pers tersebut Presiden Palestina Mahmoud Abbas berterima kasih kepada Rusia yang mengakui kemerdekaan Palestina pada 1988. Menurut Abbas, 109 dari total 192 negara anggota PBB sudah menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan negara Palestina. Namun Israel mengancam, deklarasi unilateral kemerdekaan Palestina bisa membuat proses perundingan damai kembali ke titik nol.

Medvedev masuk ke tepi barat yang diduduki Israel melalui jalur yang tidak biasa, ia beserta rombongan berkonvoi dari bandara Amman Yordania menyebrangi jembatan Allenby yang biasanya ditutup untuk umum. Ini adalah

²<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/01/10/150305-tamper-israel-rusia->

rute yang tidak biasa dilewati oleh kepala negara. Selain pasukan keamanan palestina, rombongan Medvedev juga dikawal aparat keamanan dan petugas imigrasi Israel.

Pengakuan Medvedev ini penting bagi proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. Pasalnya, Medvedev akan menghadiri pertemuan dengan empat pihak yang selama ini berupaya menjembatani proses perdamaian Timur Tengah antara Israel dan Palestina di Muenchen, Jerman, Februari mendatang. Tiga pihak lainnya yakni AS, Uni Eropa, dan PBB. Dalam kunjungan Medvedev ke Tepi Barat, sedikitnya tiga kesepakatan ditandatangani dan sekitar US\$30 juta dialokasikan Rusia untuk bidang media, pertanian, dan olahraga di Palestina.

Usai memastikan mendukung berdirinya negara Palestina, Rusia bergerak cepat. Negara Beruang putih tersebut, bahkan langsung melakukan pembicaraan empat mata dengan Israel, atau membujuknya. Karena itu, Moskow akan menggelar pembicaraan dengan Tel Aviv terkait isu kemerdekaan modern negara Palestina dengan ibukotanya Jerusalem Timur.

Medvedev sebelumnya menegaskan kembali dukungan Rusia terhadap kemerdekaan palestina dalam sebuah pertemuan dengan Raja Abdullah II di Yordania itu merupakan lanjutan dari pembicaraan pemimpin Rusia itu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas ditepi barat pada Selasa.

Medvedev mengatakan kepada Abbas bahwa Uni Soviet telah mengakui negaranya pada 1988 dan posisi Rusia tidak berubah tentang pengakuan itu.

Medvedev mengulangi bahwa Rusia akan tetap menjadi salah satu pendukung

upaya perdamaian timur tengah dan akan mempersiapkan rekomendasinya terhadap kuartet mediator internasional.

Empat pihak yang menjadi mediator tersebut adalah Rusia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa Bangsa, serta Uni Eropa. Mereka akan bertemu di Munich pada bulan depan untuk membicarakan masa depan upaya damai dan stabilitas di Timur Tengah. Medvedev mengatakan hanya upaya bersama yang dapat membantu penyelesaian konflik antara Palestina – Israel, dan Rusia akan berkonsultasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perdamaian itu. Upaya pembicaraan langsung antara Israel dan Palestina, yang dimulai kembali pada September setelah 20 bulan terhenti, kembali pupus pada Desember setelah Israel menolak penghentian pembangunan permukiman Yahudi di wilayah yang didudukinya Tepi Barat³.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah *“Apa Kepentingan Rusia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina Di Pertemuan Antara Presiden Rusia Dengan Presiden Israel Di Forum Ekonomi Dunia Di Davos Pada Tanggal 26-30 Januari 2011?”*

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman bagi Penulis untuk mempermudah melakukan kegiatan penelitian dan analisis data yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke

³<http://adani.international.org/index.php/2011/01/usi-dukung-pasrah-palestina-rusia-mulki-buink>

arah yang tidak signifikan, maka Penulis mencoba mengajukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian tentang peranan Rusia dalam membangun aliansi peradaban dengan dunia Islam. Kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Teori-teori tersebut akan diterapkan melalui pola pikir silogisme, yakni pola pikir yang disusun berdasarkan pernyataan premis mayor dan premis minor serta sebuah kesimpulan. Dinamikan hubungan internasional dalam konteks kekinian menggambarkan tentang suatu realitas lebih baik bagi masing-masing anggota. Setiap Negara-bangsa tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar Negara yang melintasi batas Negara dimana setiap Negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan Negara lain.

Hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana oleh karena tiap-tiap Negara memiliki kedaulatan/ sovereignty. Hubungan yang terjalin antar Negara tersebut mempunyai tiga pola, yakni kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*) antar Negara dengan Negara lainnya. Dalam memahami dinamika interaksi internasional, maka tidak terlepas dari studi hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional menurut penjelasan K.J Holsti dalam bukunya yang

“Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga-warga. Pengkajian hubungan internasional, termasuk di dalamnya pengkajian tentang politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai Negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan-perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”⁴.

Ilmu hubungan internasional sendiri muncul setelah perang dunia I (1914 – 1918) yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terulang kembali perang dunia yang mengakibatkan kehancuran umat manusia dan kebudayaannya, serta ingin menciptakan suatu negara yang aman, damai, berdaulat, dan saling menghormati satu sama lain. Dalam manifestasi hubungan internasional, setiap Negara memiliki politik luar negerinya masing-masing. Politik luar negeri tersebut berlandaskan pada kepentingan nasional (*national interest*). Penjelasan ini dapat dilihat dan dipertegas dalam buku Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan dewasa Ini yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni : “Politik luar negeri pada hakekatnya adalah alat suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional, kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar

negeri merupakan aspek pula dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Analisa politik".(Kusumaatmadja,1983:52).

Analisa politik luar negeri diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional dengan dipusatkan pada penelitian kepentingan nasional dan tujuan bangsa, alternative kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bangsa biasanya bersifat tetao. Kepentingan nasional Rusia misalnya, dengan merangkul Negara-negara muslim (palestina) dan membangun aliansi peradaban Islam di dalamnya, Rusia dan dunia Islam bisa menjadi kekuatan dahsyat yang dapat menyeimbangi kekuatan dunia yang saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Mengenai kepentingan nasional, dijelaskan oleh Dahlan Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional, bahwa : "Kepentingan nasional memberikan konstelasi yang diperlukan dalam kebijaksanaan nasional suatu Negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan kearah usaha tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru".(Nasution,1983:43).

Oman Heryaman menyatakan bahwa "kepentingan nasional yang dirumuskan suatu Negara sebagai identifikasi dan adaptasi kepentingan terhadap system lingkungan internasional (domestic environment)". Kepentingan nasional diupayakan dengan jalan kebijakan luar negeri yang merupakan instrument dalam mengupayakan segala kepentingan nasional

yang berorientasi diluar dari batas Negara-negaranya. Jack C. Plano dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan pengertian kebijakan luar negeri sebagai berikut :

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara sebagai sebuah inisiatif/ sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh Negara lain”⁵.

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa factor determinan, antara lain :

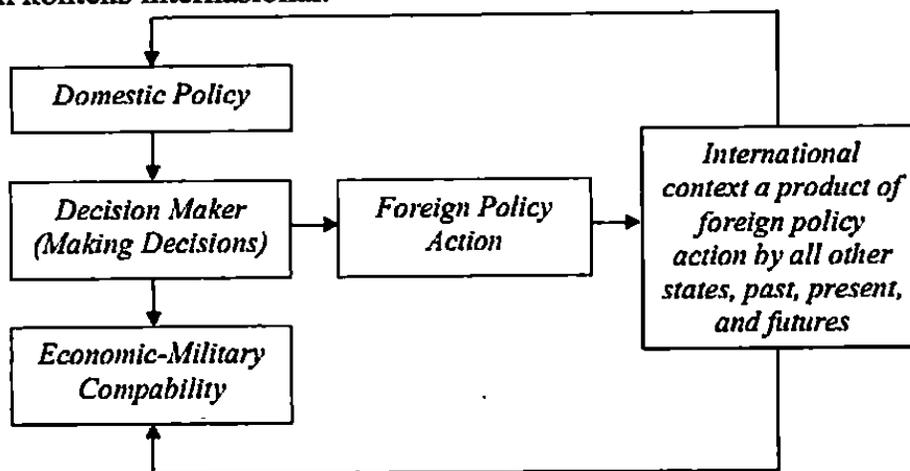
1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik;
2. Situasi ekonomi dan militer domestic, termasuk factor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, yaitu pengaruh Negara-negara lain atau konsentrasi politik internasional.

Keputusan luar negeri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, dan militer) dan konteks internasional. Konteks internasional diartikan sebagai produk berbagai keputusan dan tindakan

⁵ Plano, Jack C dan Ray Otker. *Kamus Hubungan Internasional*, CV Ashidin Bandung, hal. 5

politik luar negeri pada masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dapat diantisipasi (Jatmika, 2002:151).

Tabel dibawah ini menjelaskan sebuah keputusan luar negeri bisa dipengaruhi oleh berbagai kondisi dalam negeri (politik, ekonomi dan militer) dan konteks internasional.



Gambar 1.1
Teori proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri
William D. Coplin (Jatmika, 2002:151).

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri (the decision making process) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ataupun kerugian yang sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan⁶.

⁶ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES

Perpanjangan dari politik luar negeri suatu Negara adalah politik internasional Dahlan Nasution menjelaskan tentang politik internasional sebagai berikut :

“Politik internasional selalu mudah meluas, karena motivasi pelakunya sangat ditentukan oleh dalam negerinya dan tidak ada pembatasan universal pada tindakannya. Nilai-nilai yang masuk kedalam politik luar negeri akan dipertahankan dengan segala kekuatan secara tak terbatas. Karena itu dalam banyak segi politik internasional adalah manifestasi dari proses politik dalam bentuknya yang paling sederhana”.(Nasution,1983:42)

Dari politik internasional inilah yang menjadikan suatu Negara dapat berdiplomasi dengan Negara lain. Diplomasi merupakan bagian atau instrument dari politik luar negeri. Diplomasi hanya dapat dijalankan oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai otoritas Negara. Di dalam pembicaraan sehari-hari, diplomasi mempunyai arti yang berbeda-beda. Praktik diplomasi mensyaratkan adanya batasan dari kebijakan luar negeri. Kebijakan semacam itu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti, geografi, kebutuhan ekonomi dan sumber daya, strategi dan keperluan pertahanan, adanya persekutuan dengan Negara lain, dan lain sebagainya (Suryokusumo,2004:7).

Tentang definisi diplomasi dijelaskan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politik Antar Bangsa, bahwa : “Diplomasi ialah bentuk-bentuk dan cara-cara untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang diharapkan dalam hubungan internasional dengan menggunakan kecerdasan dan

kelincahan berkenaan dengan pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dari Negara-negara berdaulat”⁷.

Suatu diplomasi diwujudkan dalam bentuk kerjasama, baik yang bersifat bilateral, Maupun multilateral. Teuku May Rudy dalam bukunya yang berjudul Organisasi dan Administrasi Internasional menjelaskan tentang pengertian kerjasama internasional, yakni:

“Kerjasama internasional adalah suatu bentuk kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas-batas Negara baik antar pemerintah ataupun non pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Jika kerjasama internasional itu dalam bentuk organisasi internasional maka harus ada struktur yang jelas dan lengkap yang melaksanakan fungsi organisasi yang jelas dan lengkap yang melaksanakan fungsi organisasi secara berkesinambungan”.(Rudy,1993:3).

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat internasional yang saling tergantung satu sama lain serta suatu usaha dari masing-masing masyarakat internasional untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama. Dalam melakukan kerjasama tersebut diperlukan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. Tujuan dari kerjasama tersebut ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Namun dewasa ini pendekatan tentang masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu yang bersifat multidimensional terutama dimensi non

⁷⁷ Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations*. Calcutta, 1966, hal. 153.

militer, seperti degradasi lingkungan, masalah kemiskinan, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan perempuan dan anak, pekerja illegal, terorisme, dan penyebaran penyakit menular. Perluasan pemikiran ini muncul sejalan dengan perubahan kondisi keamanan.

Berkaitan dengan keamanan, Rusia membangun aliansi dengan Negara-negara muslim bukan hanya untuk mengambil suatu keuntungan tertentu seperti berlindung di bawah Negara-negara islam untuk keamanan negaranya dari Negara-negara besar lainnya karena dunia mengakui bahwa Negara-negara Islam memiliki kekuatan yang cukup besar dalam ketahanan negaranya atau membuat aliansi ini hanya untuk kepentingan Politik dan ekonominya saja. Rusia tidak memandang dari sisi-sisi tersebut tapi bagaimana menciptakan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia bahkan Rusia peduli akan peradaban di dunia Islam.

Dengan mempertahankan masalah dan berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat diasumsikan sebagai berikut :

1. Rusia menjalin hubungan dengan Palestina untuk keamanan (Security) adalah upaya Rusia untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (deterrent).
2. Rusia menjalin hubungan dengan Palestina untuk Kesejahteraan (Prosperity) adalah keadaan sejahtera dalam hal ekonomi kedua negara.

Rusia merupakan salah satu anggota tetap DK keamanan PBB yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga dan membuat terciptanya proses keamanan di atas dunia tak terkecuali Timur Tengah khususnya menciptakan

perdamaian Antara Palestina dan Israel supaya tidak merebaka ke Negara lainnya maka perlu adanya perdamaian maka dari itu adanya pengakuan Kedaulatan Palestina terlebih dulu sebelum memfasilitasi proses perdamaian kedua Negara di Davos pada bulan Januari 2011.⁸

Rusia merupakan negara yang cukup dekat dan berpengaruh di Timur Tengah walaupun Uni Soviet telah runtuh, namun masih ketergantungannya dari negara-negara Timur Tengah terhadap Rusia masih cukup terlihat jelas, seperti kerjasama Rusia-Palestina dalam bidang militer, pendidikan, perdagangan dan minyak bumi atau gas.⁹

Dan untuk mencapai kepentingan nasional seperti yang diharapkan diatas, maka setiap negara harus mengkaitkan kepentingan nasionalnya melalui upaya kerjasama dengan banyak bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keamanan global. Terkait hal tersebut di atas setiap negara selalu berupaya melakukan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut diperlukan kebijakan luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan mengembangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks ini kebijakan luar negeri menarik korelasi yang begitu erat dengan kepentingan nasional, antara lain dinyatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara sudah seharusnya didasarkan pada beberapa sumber yang mengacu

⁸ Mark A. Smith, *Conflicts Study Research Center UK Ministry Defense*, 17 April 2002

pada berbagai bentuk kepentingan nasionalnya. Namun sebelum melakukan kerjasama yang formal antar Negara, hendaknya suatu negara terlebih dulu mengakui kedaulatan Negara yang ingin diajak kerjasama.

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa Kepentingan Rusia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina Di Pertemuan Antara Presiden Rusia Dengan Presiden Israel Di Forum Ekonomi Dunia di Davos Pada Tanggal 26-30 Januari 2011 adalah memperluas pengaruh keamanan dan ekonomi Rusia di kawasan Arab.

G. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dan interview dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Kepentingan Rusia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina Di Pertemuan Antara Presiden Rusia Dengan Presiden Israel Di Forum Ekonomi Dunia Di Davos Pada Tanggal 26-30 Januari 2011?” dibatasi dengan fakta-fakta yang terjadi pada Di Forum Ekonomi Dunia Di Davos pada

tanggal 26 Januari 2011 sampai 31 Mei 2011. Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dalam penganalisaan nanti tidak sedetail pengaplikasian penelitian sesungguhnya. Akan tetapi diusahakan untuk tetap relevan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

- Pada Bab I Menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan daftar Pustaka.
- Bab II Tentang penjelasan dan gambaran tentang Russia dan Palestina secara umum, seperti sistem pemerintahan dan kebijakan luar negeri Russia dalam melakukan kerjasama luar negeri.
- Bab III Kepentingan Rusia Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina Di Pertemuan Antara Presiden Rusia Dengan Presiden Israel Di Forum Ekonomi Dunia Di Davos Pada Tanggal 26-30 Januari 2011
- Bab IV Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.